



PENANGANAN PENEGAKAN HUKUM OVER DIMENSION DAN OVER LOADING (ODOL)

Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri





DASAR HUKUM



UU NO. 8 TH. 1981 TTG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)

UU NO. 2 TH. 2002 TTG POLRI

- UU NO 22/2009 TTG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
- PP NO 80/2012 TTG TATA CARA RIKSA KEND BERMOTOR DI JALAN & PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS & ANGKUTAN JALAN
- SE MENHUB NO 14/2016 TTG TUGAS DAN KEWENANGAN PPNS DI BID LALU LINTAS & ANGKUTAN JLN DI LINGKUNGAN DISHUB

PP NO.74 TH,2014 TTG ANGKUTAN JALAN

PP NO. 43 TH. 2010 TTG TATA CARA PELAKS. KOORD, WAS & BIN TEKNIS THDP POLSUS, PPNS & PAM SWAKARSA

PERKAP NO. 20 TH. 2010 TTG KORWASBIN SIDIK PPNS



SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA



INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM





TUJUAN PENEGAKAN HUKUM PPNS PERHUBUNGAN DARAT

1. KEPASTIAN HUKUM

2. RASA KEADILAN

3. KEMANFAATAN

PATUH DAN BUDAYA TERTIB LALU LINTAS

PROFESIONALISME GAKKUM :
PROFESIONAL
TRANSPARAN
AKUNTABEL

UPAYA GAKKUM BERORIENTASI PD PROSES & HASIL TDK MENIMBULKAN DAMPAK NEGATIF

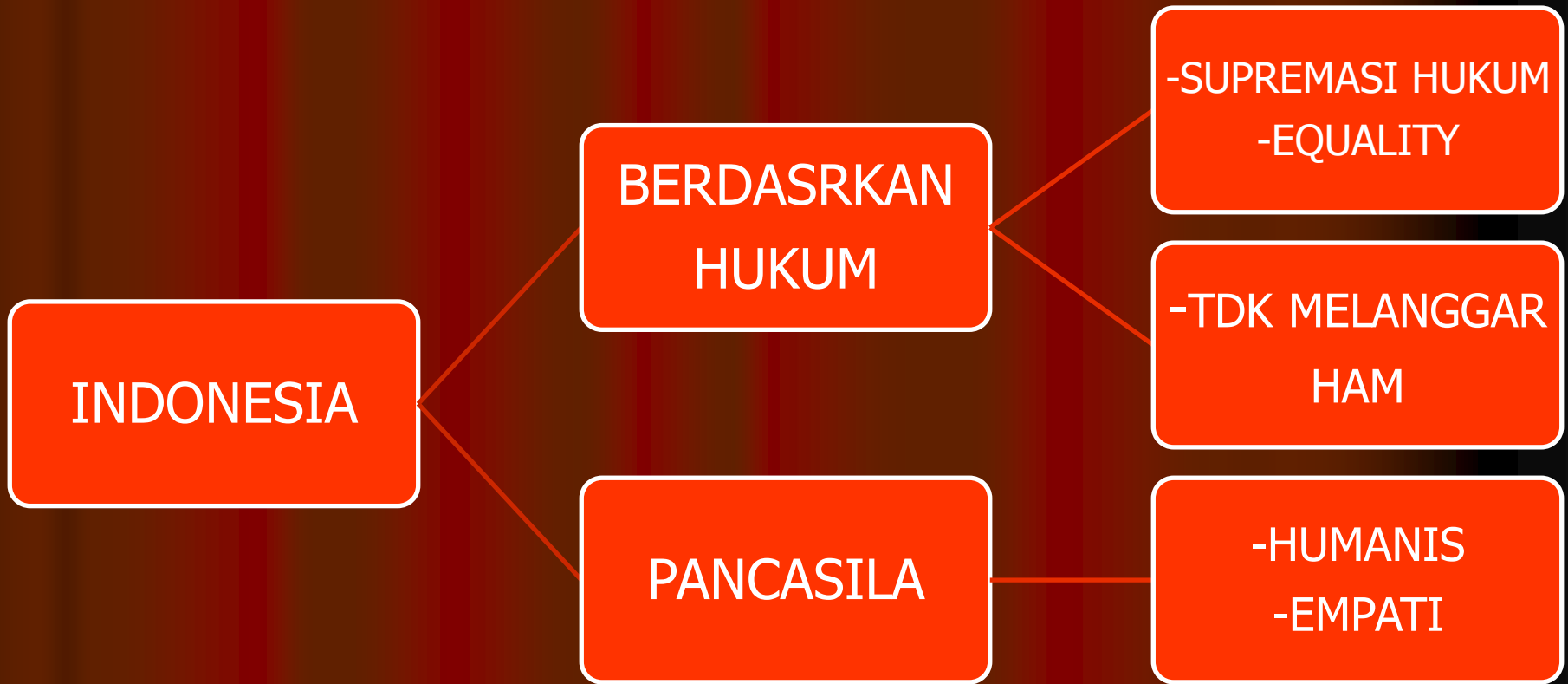
MASYARAKAT TERTIB & BERBUDAYA

KESELAMATAN & KEAMANAN BLALU LINTAS & ANGKUTAN JALAN





NEGARA BERDASARKAN HUKUM





POLRI SEBAGAI KORWAS PPNS



FILOSOFIS

1. POLRI SBG KORWAS MEMBANTU PPNS DLM LAKS GAKUM
2. PENGUATAN SINERGITAS
3. GERBANG UTAMA SIDIK

SOSIOLOGIS

1. HARAPAN MASY KPD POLRI DAN PPNS. PROFESIONAL, TRANPARAN DAN AKUNTABEL
2. MENCEGAH EGO SEKTORAL INSTANSI
3. SEBAGAI JEMBATAN ARTI
4. ADMINISTRATIF PENAL LAW

YURIDIS

1. PSL 14 (1) HRF F UU NO 2/2002 TTG POLRI
2. PSL 6,7,107 DAN 109 KUHAP
3. 78 UU TENTANG TINDAK PIDANA LAIN/TERTENTU

**S
T
R
A
T
E
G
I
S**

**POLRI
SEBAGAI
KORWAS
PPNS**



EFEKTIFITAS HUKUM UU NO 22 TH 2009



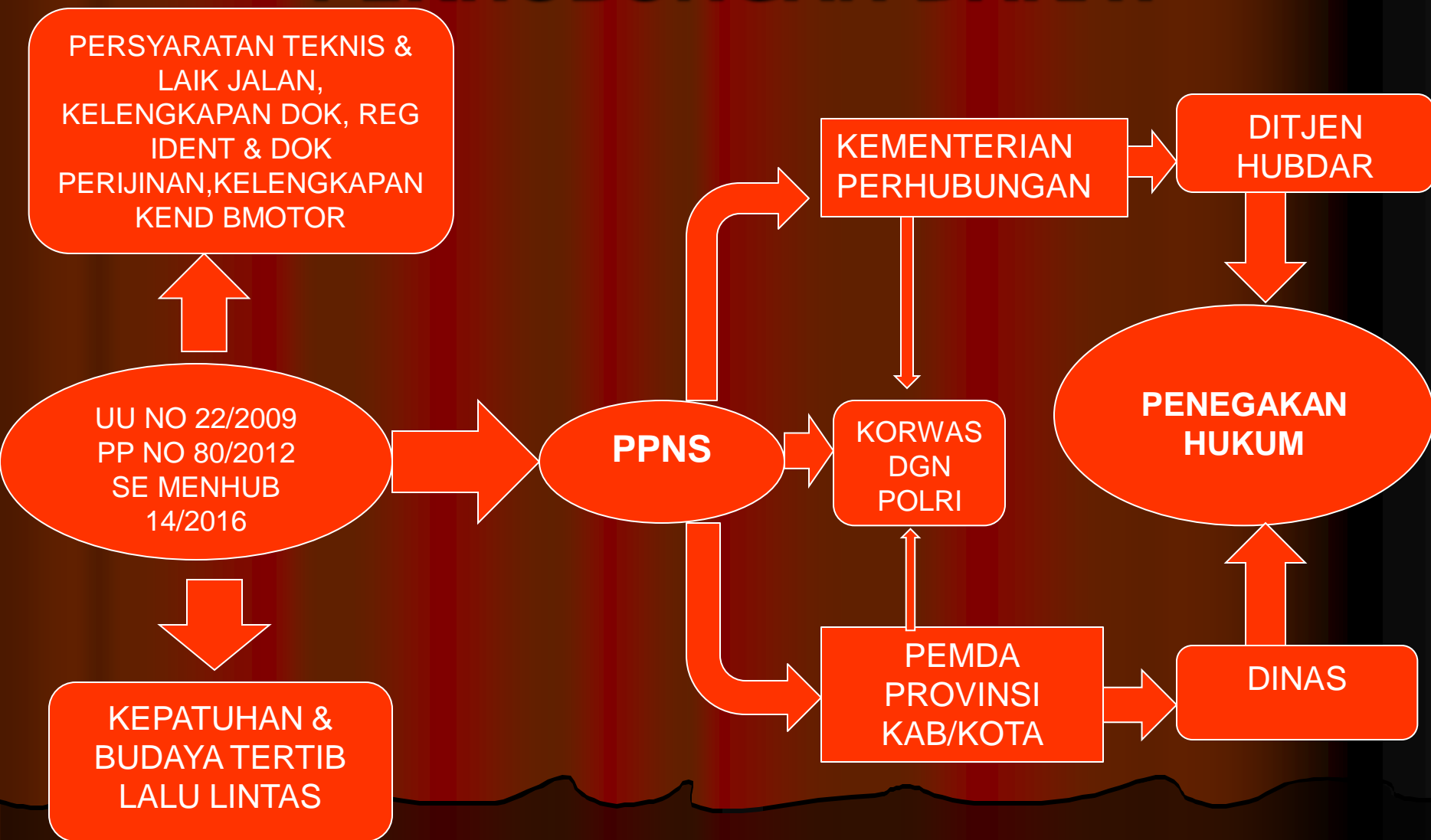
**EFEKTIFITAS
HUKUM
UU NO
22/2009**

DAYA KERJA
HUKUM DLM
MENGATUR &
MEMAKSA MASY
UTK TAAT/PATUH
HUKUM

WUJUDKAN
KEAMANAN,
KESELAMATAN,
KETERTIBAN DAN
KELANCARAN
BERLALU LINTAS
DAN ANGKUTAN
JALAN



PENEGAKAN HUKUM PPNS PERHUBUNGAN DARAT





KONDISI OVER LOADING DAN OVERDIMENSI SAAT INI



**JUMLAH KENDARAAN OVER LOADING DAN
OVERDIMENSI SEMAKIN BERTAMBAH BANYAK**

PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN DIABAIKAN

PELAKU USAHA TIDAK TAAT HUKUM

TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS SEMAKIN NAIK



4 JENIS PELANGGARAN (UU NO 22/2009)



- Pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan,
- Pelanggaran terhadap muatan,
- Pelanggaran perizinan,
- Pelanggaran terhadap rambu dan marka.



PELANGGARAN HUKUM OVER DIMENSI & OVER LOADING (UU NO 22/2009)



- Pasal 277
- Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).Psl 138 ayat (3), angkutan umum dan atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.



KENDALA PENEGAKAN HUKUM OVERDIMENSI DAN OVERLOADING



1. EKONOMI/MATA PENCAHARIAN MASY

2. KEMAMPUAN OPSNAL GAKUM

3. PERATURAN DAN SANKSI YG BELUM TEGAS

4. KERJASAMA DAN KOORDINASI DI LAPANGAN

**5. INFORMASI DAN KOMUNIKASI KPD MASY TTG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGANH MASIH BLM OPTIMAL**



STAKE HOLDER PENEGAKAN HUKUM OVERDIMENSI DAN OVERLOADING





KOORDINASI POLRI DGN PPNS PERHUBUNGAN DARAT





SINERGITAS

SINERGI STRATEGIS

- KOORD FORMAL (MOU.PKS)
- KOORD INFORMAL (PERTEMUAN RUTIN)

SINERGI OPEASIONAL

- KERJASAMA OPERASI/TIM TERPADU
- KOORD PARA MIDLE MANAGER DI LAP

SINERGI TAKTIS

- LATKATPUAN BERSAMA
- RAKERNIS
- COACHING CLINIC

HUBUNGAN OPS POLRI DGN PPNS PERHUBUNGAN DARAT

PERATURAN PEMERINTAH NO. 43 TAHUN 2012

Koordinasi :

- **TERIMA SPDP DARI PPNS UTK DITERUSKAN KPD PU.**
- **MEMBERI BANTIS, TAKTIS, UPAKSA DAN KONSULTASI SIDIK KPD PPNS UTK PENYEMPURNAAN DAN MEMPERCEPAT SAIKARA.**
- **MENERIMA BP DR PPNS DAN MENERUSKAN KPD PU.**
- **HENTI SIDIK OLEH PPNS.**
- **TUKAR MENUKAR INFORMASI TTG DUGAAN ADANYA TP YG SIDIK OLEH PPNS.**
- **RAPAT SECARA BERKALA.**
- **PENYIDIKAN BERSAMA**

Pengawasan :

- **HADIRI DAN BERIKAN PETUNJUK DLM GELAR PERKARA YG DILAKS PPNS.**
- **MINTA DAN TELITI LAPJU SIDIK DR PPNS.**
- **BERSAMA PPNS TELITI BP HSL SIDIK YG DILAKS OLEH PPNS DAN MENERUSKAN KPD PU.**
- **ATS DSR PERMINTAAN PIMPINAN INSTANSI PPNS MELAKS SUPERVISI BERSAMA KE JAJARAN PPNS.**
- **MELAK PENDATAAN JLH, INSTANSI DAN WILAYAH PENUGASAN PPNS, PENANGANAN PERKARA OLEH PPNS SERTA BANSIDIK DR PENYIDIK.**
- **ANEV PELAKS TGS SIDIK YG DILAK OLEH PPNS.**

Pembinaan :

- **DIKLAT FUNGSI TEKNIS SIDIK DLM RANGKA PEMBENTUKAN PPNS.**
- **KATPUAN DG PELATIHAN ATAU PENCERAHAN FUNGSI TEKNIS SIDIK.**



BANTUAN KPD PPNS PERHUBUNGAN DARAT

KUHAP

PROSES GAKUM

BANTUAN KPD PPNS

UU LL ANGG JLN

- BANTUAN TAKTIS :
 - PERSONIL
 - PERALATAN
 - Pengerahan Kuat
- BANTUAN TEKNIS :
 - LABFOR
 - PSIKOLOGI
 - IDENT, INAFIS DLL
- BANTUAN UPAYA PAKSA
 - PEMANGGILAN
 - PENANGKAPAN
 - PENAHANAN
 - GELEDAH, SITA, DSB
- PETUNJUK LANGSUNG TEKNIS PENYIDIKAN

GAKUM PROFESIONAL, TRANSPARAN .AKUNTABEL

SEKIAN DAN TERIMA KASIH
